KETERLIBATAN UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DALAM MENGATASI MASALAH KEKERASAN BERBASIS GENDER DI INDONESIA TAHUN 2018-2021

Oleh : Sri Nurul Wahyuni

Email : sri.nurul0136@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int Rel

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes the motives for assistance from the United States Agency for International Development (USAID) in overcoming the issue of gender-based violence in Indonesia in 2018-2021. This assistance is carried out through two programs, USAID Bersama and USAID eMpowering Access to Justice (MAJu). These programs are being implemented together with the Indonesian government, local organizations and independent institutions from Indonesia.

This research is a qualitative research. The data collection methods used are interviews and document analysis. The perspective used is constructivism with foreign aid theory. The level of analysis used is the group level.

This research looks for USAID's involvement in working to empower communities and change their mindsets around gender-based violence. Some of USAID's efforts are believed to be successful in supporting local organizations in improving Indonesian laws, as well on creating new new perspectives, knowledge and values.

Keywords: USAID, gender-based violence in Indonesia, foreign aid policy.

PENDAHULUAN

USAID merupakan lembaga internasional yang didirikan pada tanggal 3 November 1960-an, dan ditandatangani secara resmi oleh Presiden John F. Kennedy pada tahun 1961. Sejak USAID didirikan hingga saat ini, USAID aktif dalam menyalurkan bantuan-bantuannya kepada negara-negara tujuan, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan AS setelah kemerdekaannya dari jajahan Belanda, tepatnya sejak tahun 1949. Sejak saat itu, AS dan Indonesia selalu meningkatkan hubungan baik dengan memperluas kerja sama dalam berbagai aspek penting secara regional dan global, hingga saat ini.¹ Salah satu bantuan AS kepada Indonesia melalui USAID yakni mengatasi masalah kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi.²

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menekankan bahwa kekerasan merupakan manifestasi dari hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang telah mengarah

pada dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan mencegah kemajuan penuh perempuan.³

Secara historis, kegiatan diplomatik, pemrograman, data statistik dan penelitian, menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender lebih sering terjadi pada perempuan dan anak perempuan. Hal ini disebabkan karena kesenjangan gender yang menciptakan pemikiran bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan kaum lemah dan tak mampu berperan lebih dibandingkan dengan laki-laki. Kekerasan berbasis gender memang dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun data prevalensi secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia lebih sering menjadi korban kekerasan berbasis gender. Akibatnya, istilah "kekerasan terhadap perempuan" dan "kekerasan berbasis gender" sering digunakan secara bergantian.⁴

Permasalahan kekerasan berbasis gender, merupakan permasalahan yang masih terlalu umum di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, AS membuat strategi untuk menanggapi permasalahan kekerasan berbasis gender, karena dapat memberikan dampak-dampak yang buruk, baik bagi individu maupun negara.

Pada tahun 2012, Kongres AS pertama kali meminta strategi untuk menanggapi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, untuk mencegah dan menanggapi kekerasan berbasis gender secara global. Pada tahun 2016, AS meningkatkan strategi baru untuk meningkatkan hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan secara global sebagai prioritas keamanan

¹ US Embassy Government, "The United States-Indonesia Relationship," 2021, <https://id.usembassy.gov/the-united-states-indonesia-relationship/> (diakses pada 4 Januari 2023)

² Permen PPPA, "Permen PPPA No 13 Thn 2020 Ttg Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana," 2019, 1–65.

³ Inter Agency Committee Standing, "Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action," in *Response*, 2015, 1–366.

⁴ US. Department of States, "United States Strategy to Prevent and Respond to Gender-Based Violence Globally 2022," 2022, 28.

nasional, diplomatik, dan bantuan luar negeri AS.

AS memiliki kepercayaan bahwa seharusnya seluruh warga negara memiliki hak yang setara. Kesetaraan hak untuk mendapatkan peran yang sama, untuk mendapatkan keadilan yang sama, merupakan nilai dan norma yang diterapkan oleh AS sebagai negara demokrasi. Oleh sebab itu, AS mengambil kebijakan untuk menangani dan mencegah kekerasan berbasis, baik dalam negaranya maupun secara global.⁵

Salah satu langkah AS dalam memperjuangkan perempuan secara global yakni dengan mendirikan Kantor Sekretariat Masalah Perempuan Global yang berupaya untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan dalam diplomasi, kemitraan, dan program AS. Pendirian kantor ini dilatar belakangi dengan kepercayaan AS akan pentingnya peran perempuan terhadap pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, keamanan dan stabilitas yang lebih besar di seluruh dunia.⁶ Oleh sebab itu, AS mengambil langkah untuk membantu para korban kekerasan berbasis gender di Indonesia melalui USAID. Selain dengan tujuan membantu Indonesia dalam menghadapi permasalahan kekerasan berbasis gender, AS juga memiliki kepentingan dalam menjalankan kepentingan luar negerinya dengan mempromosikan beberapa nilai yang mereka percayai.

KERANGKA TEORI

Perspektif Konstruktivisme

Cara perspektif konstruktivisme memandang fenomena hubungan internasional tidak hanya fokus pada pencapaian kepentingan semata, namun juga dipengaruhi oleh alat komunikasi, (*language*), identitas (*identity*), intensi

(*intention*), serta nilai-nilai (*value*). Selain itu konstruktivisme menekankan pada pentingnya dimensi sosial dalam hubungan internasional yang mengacu pada faktor norma, nilai, aturan, identitas budaya, dan simbol linguistik sebagai penentu. Faktor-faktor tersebut membentuk menjadi identitas atau kepentingan sang negara, namun struktur norma dan nilai sebuah negara tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aktor/tokoh untuk mewujudkannya. Peran paradigma dalam proses pembuatan kebijakan sangat krusial terhadap pembentukan persepsi yang menentukan formulasi politik luar negeri suatu negara. Konstruktivisme melihat realitas internasional sebagai hasil konstruksi sosial para pembuat kebijakan.⁷

Teori Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri adalah alat yang sangat fleksibel dan dapat bertindak sebagai wortel dan tongkat, yang merupakan sarana untuk mempengaruhi peristiwa, memecahkan masalah tertentu, dan memproyeksikan nilai-nilai AS.⁸

Selain itu menurut lensa konstruktivis bantuan luar negeri didefinisikan sebagai aturan atau norma bagi orang kaya untuk membantu negara miskin untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini didukung dengan pendapat David Lumsdaine dalam bukunya "*Moral Vision and International Politics*" yang menyatakan bahwa; bantuan luar negeri tidak hanya identik dengan politik dan ekonomi negara pendonor, namun juga menunjukkan rasa kemanusiaan kepada negara miskin dan berkembang. Selain itu bantuan luar negeri juga didasarkan dengan ide, norma dan nilai serta tradisi sosial demokrasi yang berlaku di negara pendonor. Tujuannya untuk menyebarkan

⁵ *Ibid.*

⁶ US Department of States, "Women's Economic Empowerment," <https://www.state.gov/womens-economic-empowerment-3> (diakses pada 6 Desember 2022)

⁷ Bob Sugeng Hadiwinata, "Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis.," *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, 2017, 22.

⁸ Curt Tarnoff and Marian L. Lawson, "Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy," *An Introduction to U.S. Foreign Aid and International Food Aid Programs*, 2016, 1-46.

dan mempromosikan nilai-nilai yang ada pada negara pendonor kepada negara yang dituju.⁹

Pada penelitian ini, AS menggunakan kebijakan luar negerinya yakni “bantuan luar negeri” untuk membantu negara tujuan menghadapi masalah yang terjadi sekaligus berdiplomasi mengenai nilai dan norma yang mereka miliki yakni nilai demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang dianut Amerika untuk menjamin masyarakatnya memiliki kebebasan hak, yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Dalam penelitian ini, USAID menjadi tokoh utama sebagai jalan mereka untuk berdiplomasi terkait nilai dan norma yang mereka miliki.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data diperoleh dan disatukan yang didapatkan langsung oleh narasumber atau dari objek yang terlibat kepada peneliti. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan oleh objek penelitian yang terkait. Data sekunder biasanya berasal dari dokumen, jurnal artikel atau penelitian terdahulu.¹⁰

Pada penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara dengan Yoel Korowa sebagai *project coordinator* USAID Bersama, untuk melengkapi beberapa data terkait dengan program USAID Bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki budaya patriarki di

tengah-tengah kehidupan masyarakatnya, beberapa dari nilai-nilai patriarki bahkan dijadikan pedoman bagi sebagian masyarakat. Budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat, menciptakan ketidakadilan gender yang dapat berdampak negatif bagi perempuan. Oleh sebab itu, tidak jarang perempuan mendapatkan label negatif dari masyarakat. Budaya patriarki yang melekat ini menciptakan *victim blaming* kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan. Permasalahan ini yang menyebabkan banyak korban perempuan memilih bungkam karena takut mendapatkan stigma buruk oleh masyarakat bahkan dari keluarga sendiri.¹¹

Budaya patriarki memang menjadi faktor utama dari terjadinya kekerasan berbasis gender. Selain itu ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, diantaranya; rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia terkait UU yang telah ditetapkan negara; kondisi perekonomian dalam sebuah rumah tangga yang memburuk, juga dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga; dan kesalahpahaman masyarakat akan nilai-nilai agama dan kekerasan yang terjadi malah tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik dalam masyarakat sehingga menjadi bagian dari kebiasaan dalam kehidupan.¹²

Jumlah Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2018-2021			
2018	2019	2020	2021
406.178	431.471	299.911	338.496

⁹ Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics* (Chicago: University of Chicago Press, 2008)

¹⁰ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹¹ Tristiana dkk, “Adolescences Experience of Gender-Based Violence: A Qualitative Study,” *International Journal of Public Health Science* 12, no. 2 (2023): 822–30.

¹² Jovanka Yves Modiano, “Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 129–40.

Sumber : Komnas Perempuan

Berdasarkan tabel yang tertera di atas menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyerang dan menyebar Indonesia sejak awal tahun 2020. Situasi pandemi ini, mengharuskan seluruh warga negara untuk tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar untuk mencegah penularan Covid-19. Hal ini yang menjadikan jumlah kekerasan meningkat selama pandemi. Namun dikarenakan korban yang dekat dengan pelaku, korban memilih untuk bungkam dan enggan melapor kepada pihak yang bersangkutan.

Proyek *Empowering Access To Justice* (MAJu)

Proyek MAJu merupakan salah satu dari banyaknya proyek yang telah dilakukan USAID di Indonesia. Peran MAJu pada proyek ini adalah, membantu para Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan lembaga independen Indonesia lainnya dalam membenahi hukum Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan.

Proyek ini membantu banyak permasalahan, fokus utama dalam proyek ini adalah kelompok marginal dan perempuan yang tidak mendapatkan keadilan dari tindakan-tindakan tidak adil yang mereka alami. Selain itu MAJu juga bergerak dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan.

OMS dan OBH memainkan peran penting bagi MAJu dalam mencapai tujuan-tujuannya. Proyek MAJu bergerak dalam memperkuat kerja sama mitra OBH dan OMS lainnya dalam mewujudkan kesetaraan gender, membantu korban kekerasan berbasis gender dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender. Hal ini didukung dengan memberikan

pelatihan-pelatihan kepada para mitra OMS dan OBH terkait isu-isu gender, alhasil menciptakan berbagai tenaga profesional untuk mengatasi isu-isu gender. Melalui peningkatan dan penguatan dari dukungan MAJu, dapat membuat pergerakan dari organisasi-organisasi dari berbagai daerah untuk mengatasi isu kekerasan berbasis gender.

Selama proses dalam mewujudkan tujuannya, OMS dan OBH memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan MAJu. Dalam perannya OMS bekerja sama dengan negara dalam memberikan masukan dan mendukung perkembangan kebijakan Indonesia mengenai keadilan yang menyeluruh, bergerak untuk memantau dan menuntut tanggung jawab negara dalam berupaya menegakkan dan memberikan jaminan keadilan, serta mengingatkan janji-janji mengenai penerapan UU dasar Indonesia. Sedangkan peran OBH memastikan, memantau dan memperkuat mitranya terkait pengetahuan kesetaraan gender, memastikan bahwa setiap individu memiliki proses akan perannya dalam masyarakat, memberikan pelatihan kepada anggota untuk membela hak-hak kekerasan berbasis gender, dan mengembangkan kemampuan advokasi berbasis bukti.¹³

Program USAID Bersama

Papua dan Papua Barat merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki banyak adat budaya yang sangat kental. Namun, beberapa diantaranya dapat berdampak buruk bagi sebagian masyarakat Papua dan Papua Barat, terutama perempuan dan anak. Pola pikir masyarakat Papua dan Papua Barat, masih bergantung pada pemikiran-pemikiran terdahulu, salah satunya adalah sistem patriarki.

AS hadir lewat USAID sebagai mitra Indonesia untuk membantu dalam

¹³ Retno Agustin, and Ghaffur Abdul, "ENDLINE REPORT USAID MAJu PROGRAM USAID MAJu / The Asia Foundation," no. 138 (2021): 2016–21.

isu kekerasan berbasis gender di Papua dan Papua Barat, yang masih terbelenggu oleh adat dan budaya terdahulu ditambah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait isu kekerasan berbasis gender. Dalam keterlibatannya membantu salah satu wilayah Indonesia ini, USAID menciptakan program yakni “USAID Bersama” yang berjalan sejak Juni 2016 dan berakhir pada Desember 2020. Program hibah yang dilaksanakan oleh *Winrock* ini, bekerja dengan masyarakat dan organisasi lokal untuk mendorong kolaborasi dan dukungan bagi kesetaraan gender saat memobilisasi masyarakat, meningkatkan pelayanan bagi para penyintas, dan memperkuat organisasi lokal di Papua dan Papua Barat, Indonesia

Sebelum USAID terlibat dalam isu kekerasan berbasis gender di Indonesia, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, polisi dan layanan untuk korban di Indonesia benar-benar kekurangan pengetahuan terkait melayani korban kekerasan berbasis gender, akibatnya pelayanan masih belum sempurna. Kurangnya koordinasi berdampak buruk pada kualitas layanan korban, rujukan kasus tidak dilakukan secara konsisten, dan korban tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan atau menerima informasi tentang layanan yang lengkap. Oleh sebab itu, USAID hadir untuk memberikan dukungan dan meningkatkan pengetahuan pemerintah secara eksklusif, meningkatkan layanan untuk para korban kekerasan berbasis gender, dan bergerak mendukung pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan berbasis gender.

Program Bersama ini bekerja sama dengan OMS dalam memberikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang wajar dalam kalangan masyarakat di Papua dan Papua Barat mengingat budaya itu sudah tertanam sejak dulu. Bersama memberikan dukungan kepada OMS dan kelompok pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya untuk memberikan edukasi akan bahayanya

kekerasan berbasis gender yang masih sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

USAID mengarahkan para organisasi masyarakat untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait kekerasan berbasis gender, berhubungan tentang norma-norma gender, pengetahuan seputar menghindari perselisihan dan kekerasan, terkait peran perempuan dan laki-laki. OMS juga memberikan arahan untuk tidak selalu terpaut dengan nilai dan budaya patriarki, dengan memberikan arahan bahwa laki-laki juga dapat berperan dalam tugas yang “dianggap” sebagai tugas perempuan. Ditambah dengan memberikan edukasi terkait keluarga berencana, kesehatan perempuan dan reproduksi, dan peran perempuan yang semakin meluas. Terakhir, USAID Bersama memberikan pencegahan kepada para pemuda pemudi tentang membangun citra diri, mengatasi stress dan trauma, hubungan kekerasan yang sehat, dan pengetahuan lainnya terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Nilai yang diberikan oleh USAID Bersama di sini adalah, terkait kesetaraan peran dan pencegahan terkait permasalahan kekerasan berbasis gender.¹⁴

ANALISIS BANTUAN USAID

Bantuan luar negeri yang dilaksanakan oleh negara-negara pendonor, pasti memiliki tujuan dan fungsi tersendiri yang dapat menguntungkan negara mitranya sekaligus negaranya sendiri. Bantuan luar negeri merupakan unsur penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara, mengingat banyaknya fungsi dan tujuan dari bantuan luar negeri itu sendiri.

Bantuan AS mendukung banyak sekali tujuan, selain membantu negara tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian, mempromosikan dan menyebarkan nilai-nilai mereka menjadi

¹⁴ USAID, “USAID BERSAMA FINAL REPORT (Gender Based Violence Prevention Gender-Based Violence Prevention),” no. June 2016 (2020).

salah satu tujuannya. Pada penelitian ini, USAID bergerak dalam membantu Indonesia dalam mengatasi masalah kekerasan berbasis gender sekaligus mempromosikan dan menyebarkan nilai-nilai terkait kesetaraan dan kemandirian kepada masyarakat Indonesia.

Bantuan yang diberikan oleh USAID tidak lepas dari nilai-nilai AS yang disebarkan secara tidak langsung lewat kedua program yang USAID ciptakan di Indonesia. Program-program yang berjalan diciptakan oleh USAID di Indonesia, pada umumnya bergerak untuk mencapai kesetaraan dan keadilan menyeluruh, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait permasalahan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan kualitas pemerintah Indonesia dalam layanan kepada korban kekerasan berbasis gender.

SIMPULAN

Keterlibatan USAID di Indonesia, membawakan hasil yang berbeda-beda. Program MAJu berhasil memberikan dukungan penuh kepada organisasi lokal, sehingga menghasilkan pengesahan RUU PKS yang telah dinantikan sejak lama. Meskipun butuh waktu yang cukup lama, dan terdapat kendala pergerakan seperti Covid-19, namun pada akhirnya pemerintah Indonesia mengesahkan RUU PKS. Sedangkan pada program USAID Bersama, tidak terlalu membawa perubahan yang signifikan, hanya membawa perubahan sosial. Beberapa kegiatan masyarakat seperti penyuluhan dan edukasi kekerasan berbasis gender masih berjalan hingga saat ini.

Kedua program yang berjalan di Indonesia, masing-masing memiliki hambatan tersendiri selama proses berjalannya program. Berdasarkan hambatan yang ada, bahwa tidak mudah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam keberlangsungan mengatasi isu kekerasan berbasis gender. Beberapa masyarakat

yang diharapkan dapat berperan penting, lebih memilih untuk mundur dan tidak ikut berperan dalam pelatihan yang diberikan oleh USAID. Selain itu, masih sulit bagi masyarakat Indonesia untuk menerima nilai-nilai yang dibawa oleh AS dalam penyuluhan dan pelatihan terkait isu kesetaraan gender.

Masyarakat Indonesia tidak berpartisipasi penuh dalam program yang diciptakan oleh USAID. Hal ini membuktikan bahwa, masyarakat Indonesia masih sulit menerima nilai-nilai baru yang dibawa oleh AS, dan masih terpaku pada sistem patriarki dan pola pikir terdahulu yang telah tertanam sejak lama karena telah diterapkan secara turun menurun.

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN RESMI

- Agustin, Retno and Ghaffur Abdul. "ENDLINE REPORT USAID MAJu PROGRAM USAID MAJu / The Asia Foundation," no. 138 (2021): 2016 21.
- Inter Agency Committee Standing, "Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action," in Response, 2015, 1 366.
- Modiano, Jovanka Yves. "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 129–40.
- USAID, "USAID BERSAMA FINAL REPORT (Gender Based Violence Prevention Gender-Based Violence Prevention)," no. June 2016 (2020).
- US. Department of States, "United States Strategy to Prevent and Respond to Gender-Based Violence Globally 2022," 2022, 28.

BUKU

- Hadiwinata, Bob Sugeng. "Studi Dan Teori Hubungan Internasional : Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis." Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, 22.
- Lancaster, Carol, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics* 80 (Chicago: University of Chicago Press, 2008)
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

JURNAL

- Tarnoff, Curt, and Marian L. Lawson. "Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy." *An Introduction to U.S. Foreign Aid and International Food Aid Programs*, 2016, 1–46.
- Tristiana dkk, "Adolescences Experience of Gender-Based Violence: A

Qualitative Study," *International Journal of Public Health Science* 12, no. 2 (2023): 822–30.

ARTIKEL DALAM WEBSITE

- US Embassy Government, "The United States-Indonesia Relationship," 2021, <https://id.usembassy.gov/the-united-states-indonesia-relationship/> (diakses pada 4 Januari 2023)
- US Department of States, "Women's Economic Empowerment," <https://www.state.gov/womens-economic-empowerment-3> (diakses pada 6 Desember 2022)

UNDANG-UNDANG

- Permen PPPA, "Permen PPPA No 13 Thn 2020 Ttg Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana," 2019, 1–65.